

**PENGELOLAAN WISATA ALAM GOSARI (WAGOS)  
OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN DESA  
DALAM ANALISIS *MASLAHAH MURSALAH***

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**FIRDA AULIYA FITHRIYANA**

**NIM: G94216165**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
SURABAYA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Firda Auliya Fithriyana

NIM : G94216165

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Peningkatan Pendapatan Desa Dalam Analisis *Maslahah Mursalah*.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2020

Saya yang menyatakan,



Firda Auliya Fithriyana

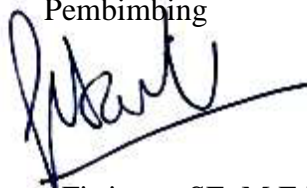
NIM. G94216165

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Untuk Peningkatan Pendapatan Desa Dalam Analisis *Maslahah Mursalah*”, yang ditulis oleh Firda Auliya Fithriyana NIM. G94216165 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 April 2020

Pembimbing



Achmad Room Fitrianto, SE, M.E.I, MA.

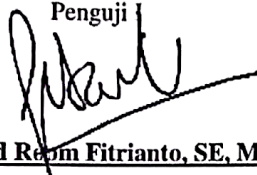
NIP. 197706272003121002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang telah disusun oleh Firda Auliya Fithriyana NIM. G94216165 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Kamis 21 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata 1 (S1) program studi Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Achmad Ream Fitrianto, SE, M.E.I, MA.  
NIP. 197706272003121002

Penguji II,



Lilik Rahmayati, S.Si., M.EI.  
NIP. 198106062009012008

Penguji III.



Drs. Agus Afandi, M.Fil.I.  
NIP. 196611061998031002

Penguji IV,



Betty Silfia Ayu Utami, SE, M.SE.  
NIP. 198706102019032019

Surabaya, 21 Mei 2020

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Drs. H. Ali Arifin, M.M.  
19621214993031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Firda Auliya Fithriyana  
NIM : G94216165  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah  
E-mail address : firdaauliyal998@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) Oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Untuk Peningkatan Pendapatan Desa dalam Analisis Masalah Mursalah

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Januari 2020

Penulis

(Firda Auliya Fithriyana)





























masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola aparat desa secara professional, namun tetap berdasarkan potensi yang dimiliki desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat desa untuk lebih produktif dan efektif dan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat desa.

Dibantu oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Gosari yang memiliki kekayaan alam yang memukau, akan menjadi hal yang sia-sia jika potensi alam tersebut dibiarkan begitu saja, maka potensi alam tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh aparat desa dan masyarakat dalam menciptakan desa wisata dan edukasi yang biasa disebut dengan Wisata Alam Gosari (WAGOS) oleh kebanyakan orang. Pendirian Wisata Alam Gosari (WAGOS) ini dimaksudkan agar mendatangkan masalah bagi masyarakat desa baik dari segi penyediaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa maupun sebagai eksistensi Desa Gosari.

Dalam penyediaan lapangan kerja yang dihasilkan dari pendirian wisata, ada peran masyarakat yang ikut serta dalam menciptakan kondisi tersebut. Karena dalam pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) ini langsung dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat desa yang tergabung dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Gosari.

Dengan dikelolanya sumber daya alam desa yang potensial ini diharapkan pendapatan Desa Gosari dapat meningkat sejalan dengan pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) yang dilakukan secara optimal dan sesuai dengan aturan yang











Tabel 2 Tinjauan Pustaka

No.	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Dantika Ovi Era Tama	Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat	BUMDes berhasil memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi desa meskipun ada beberapa unit yang belum berjalan.	Penelitian Dantika lebih terfokus pada Dampak sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada pengelolaan dalam perspektif <i>masalah mursalah</i> .
2.	Tedi Kusuma	Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Karya Mandiri Sejati	Kondisi BUMDes sudah berjalan dengan lancar, namun terkendala dengan keterbatasan sumber daya manusia.	Penelitian Tedi tidak menyertakan aspek <i>masalah mursalah</i>
3.	Nofiratullah	Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa.	Eksistensi desa terus mengalami peningkatan baik dari segi pendapatan maupun pengelolaan dengan hambatan terletak pada sumber daya manusia.	Nofi membahas tentang eksistensi dan tidak ada analisis terkait <i>masalah mursalah</i> .
4.	Munawaroh	Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui badan Usaha Milik Desa.	Program-program yang digerakkan masih aktif, dan adanya BUMDes inilah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.	Lebih ditekankan pada proses perkembangannya dan tidak menggunakan analisis <i>Masalah Mursalah</i>
5.	Garnies Lellyana Sagita	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan	Pengelolaan BUMDes untuk mendorong dan menamoung kegiatan sebagai peningkatan	Tidak menggunakan analisis <i>Masalah Mursalah</i> dalam penelitian.















Menurut Hudson (Timothy, 1999:373) dengan ciri-ciri khusus dari *Community Based Tourism* adalah berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dengan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal atau kelompok yang memiliki minat, dan memberikan kontrol yang lebih besar dalam proses dalam proses sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>23</sup>

Wujud dari *Community Based Tourism* adalah dikembangkannya desa-desa wisata, baik dari segi sumber daya alam, budaya atau sejenisnya. Keberadaan desa wisata di Indonesia saat ini mulai digencarkan, salah satunya di Desa Gosari Kabupaten Gresik, dengan Wisata Alam Gosari (WAGOS) nya. Konsep penelitian seperti ini sangat diperlukan peneliti dalam melakukan yang berkaitan dengan desa wisata.

Menurut Garrold (dalam Wilopo, 2016), terdapat dua pendekatan yang diterapkan dalam prinsip-prinsip perencanaan dalam konteks pariwisata. Pendekatan pertama yang cenderung dikaitkan dengan sistem perencanaan yang formal sangat menekankan pada keuntungan potensial dari ekowisata. Sedangkan pendekatan yang kedua, cenderung dikaitkan dengan istilah perencanaan yang partisipatif yang lebih terfokus dengan kekuatan dan pengaturan yang seimbang antara pembangunan dan perencanaan. Pendekatan ini lebih menekankan pada kepekaan terhadap lingkungan alam dalam pembangunan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>D.J. Timothy, *Participatory a View of Tourism in Indonesia* dalam *Annuals review of tourism Research*, XXVI (2), (Jakarta, 1999), 373.

<sup>24</sup>Denita Oktavia Sidabuke, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata Berbasis Masyarakat (*Community Based Tourism*)", (Skripsi – Universitas Lampung, 2018).

















pengelolaan wisata tersebut sehingga dapat mempertahankan eksistensinya di era persaingan yang sangat ketat sekarang ini. Sedangkan data sekunder yaitu tinjauan literatur dapat didapatkan dari kantor kelurahan Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah, data yang diambil ini berkaitan dengan aspek *masalah mursalah* baik dalam pengelolaanya maupun dari aspek kebermanfaatannya bagi pemerintahan desa, warga desa maupun pihak yang terlibat dalam wisata alam gosari.

Aspek *masalah mursalah* yang akan diteliti pada penelitian ini adalah dampak sebelum dan sesudah adanya wisata yang dikelola oleh BUMDes Gosari. Namun dalam hal ini masyarakat mempunyai hak penuh dalam pengelolaan yang dilakukan dan mempunyai hak atas kebermanfaatannya yang diambil dari pembangunan desa berdasarkan konsep *Community based Tourism (CBT)*.

Dalam metode pengumpulan data inilah penulis memodifikasi rancangan alur pengumpulan data yang telah ada agar lebih mudah dipahami pembaca dan juga penulis khususnya. Berikut adalah gambar Alur pengumpulan data pada Skripsi ini:









- 1) Reduksi Data, yang dimaksudkan adalah analisis yang berguna untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain, reduksi data adalah cara merangkum data yang sudah diperoleh dari kegiatan penelitian lapangan.

Semakin lama penelitian yang dilakukan semakin banyak pula data yang terkumpul. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari penelitian yang berada di lapangan cukup banyak, kompleks dan rumit, untuk itu peneliti harus mencatatnya dengan teliti dan juga rinci. Untuk mempermudah dalam proses penelitian maka harus ada proses reduksi data dimana peneliti akan memilih dan meringkas dokumen yang terdiri dari apa saja yang ditemukan pada saat survei berlangsung dilokasi penelitian, dan data yang diambil relevan dengan tema penelitian. Sehingga peneliti dalam penelitiannya dapat memberi gambaran yang jelas untuk mempermudah langkah selanjutnya.

Reduksi data sangat diperlukan dalam analisis sebuah data penelitian. Karena data dari hasil wawancara, observasi maupun tinjauan literatur sangat banyak. Misalnya Peneliti menyeleksi data dari informan dan menggolongkan data tersebut yang menyatakan sejak kapan Wisata Alam Gosari (WAGOS) berdiri, tujuan Desa Gosari mendirikan obyek pariwisata, bagaimana keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan wisata, serta bagaimana peran wisata dalam mengubah keadaan ekonomi maupun budaya di Desa Gosari.

Bukan hanya menyeleksi dan menggolongkan data, namun peneliti memisahkan data-data yang termasuk atau tidak dalam tema penelitian. Pada data yang tidak termasuk dalam tema penelitian maka peneliti membuang data tersebut agar tidak mengganggu dalam proses pembuatan skripsi ini.

- 2) Penyajian Data/Display, saat semua informasi telah disusun. Maka penyajian data yang di paparkan dalam bentuk teks naratif, grafik, bagan atau jaringan. Dengan adanya proses display data memudahkan peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya.

Tahapan ini adalah langkah kedua dari teknik kualitatif, setelah tahap reduksi data selesai maka kegiatan penyajian atau penampilan akan peneliti lakukan. Pada tahap ini diarahkan agar data yang dihasilkan dari proses reduksi dapat terorganisir dan tersusun dalam pola hubungan sehingga mempermudah dalam pemahaman dan perencanaan kerja penelitian selanjutnya. Pada tahap ini juga peneliti harus menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki arti tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan data, membuat hubungan antar kejadian untuk mengartikan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian ini.

Dalam proses display data ini, peneliti mendapatkan data dari hasil penelitian dalam bentuk data berupa tabel dan narasi. Data

berupa tabel didapat dari dokumen pribadi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang berisi tentang informasi umum desa wisata, potensi wisata dan juga jumlah fasilitas yang dimiliki Wisata Alam Gosari. Sedangkan dari Website resmi Desa Gosari berupa jumlah demografi penduduk beserta pekerjaannya yang digambarkan melalui diagram lingkaran dengan penjelasan pada data tabel sehingga dapat mempermudah dalam menganalisisnya. Display data ini juga berupa teks narasi yang didapat dari metode pengumpulan data (wawancara, pengamatan partisipasi dan tinjauan literatur), semua hasil dari pengumpulan data akan dijadikan bahan peneliti dalam menyajikan data tersebut sebagai data yang layak untuk dijadikan laporan hasil penelitian.

- 3) Verifikasi/penarikan kesimpulan, hasil dari analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan awal yang dikemukakan akan bersifat sementara jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat membuat kesimpulan berubah. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah disebut dengan tahapan verifikasi dalam teknik kualitatif. Namun jika datanya sudah valid maka dalam tahap terakhir ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis tentukan diawal.

Dalam Penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan banyak data dari berbagai informan yang sebelumnya data tersebut telah melalui proses reduksi dan display data. Dari hasil proses sebelumnya



diantaranya berasal dari masyarakat yang melakukan kegiatan produktifnya dengan berjualan di area wisata. Peneliti menggunakan 2 (dua) informan tersebut agar hasil penelitian lebih akurat karena kedua masyarakat tersebut adalah yang langsung berkenaan dengan dampak adanya desa wisata. Dengan pertanyaan yang sama tentang sejarah berdirinya WAGOS, kondisi Desa Gosari sebelum adanya wisata, keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan WAGOS, dampak positif yang didapatkan dengan adanya wisata dapat membantu peneliti membandingkan hasil data dari masing-masing informan.

- 2) Triangulasi sumber data, dengan cara mengamati kebenaran sumber data. Peneliti akan melihat dan memahami dari dokumen, catatan-catatan resmi, gambar atau foto agar menambah kevalidan data yang telah didapat dalam triangulasi metode yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Dalam triangulasi sumber data ini, peneliti mengumpulkan banyak dokumen baik dari dokumen pribadi Pokdarwis, website resmi Desa Gosari maupun media online. Misalnya dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data mengenai sejarah wisata dan informasi umum terkait desa wisata, yang kemudian dijadikan bahan pembandingan oleh peneliti dalam memahami dan menyimpulkan data penelitian yang didapat.





menginterpretasi hasil analisis dan mengukur tingkat validasi hasil analisis.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengelompokkan data dari informan dalam bidangnya. Misalnya kelompok informan dari aparat pemerintah dengan kelompok informan dari masyarakat (orang yang berjualan di area wisata), data dari dua sumber yang berbeda tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan. Dengan pertanyaan seputar partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan WAGOS, dan aspek kebermanfaatan yang didapat dari adanya desa wisata baik untuk pemerintahan desa maupun masyarakat. Setelah itu peneliti melakukan pengelompokkan hasil data untuk memperoleh data dengan tingkat kemiripan yang tinggi.

Misalnya untuk kelompok informan dari masing-masing aparat pemerintah, dari informan tersebut peneliti menemukan hasil data dengan kemiripan yang relatif tinggi dalam partisipasi dan kemanfaatan yang didapat. Begitu juga dengan kelompok informan dari masyarakat, peneliti juga menemukan tingkat kemiripan yang tinggi. Setelah itu peneliti mengelompokkan hasil data dari antar kelompok yang mempunyai kemiripan yang kecil misalnya aspek kemanfaatan yang didapat baik untuk pemerintah desa dan masyarakatnya.

Teknik diatas akan memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengambil kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, dengan menggabungkan 3 teknik analisa kualitatif, 3 tipe triangulasi dan



baik dari aparat desa maupun masyarakat yang menjadi penjual di area wisata, serta hasil penelitian yang menunjukkan bagaimana pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) begitu dengan upaya-upaya masyarakat dalam mengatasi konsisi desa melalui desa wisata.

**Bab IV Analisis Data.** Data yang diperoleh dari hasil penelitian berhubungan dengan judul penelitian yang akan dianalisis menggunakan deskriptif-kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk data sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah di paparkan oleh peneliti. Dengan menganalisis data yang didapatkan dari hasil rumusan masalah, peneliti memperoleh teori dan pengetahuan baru mengenai tema penelitian ini. Misalnya mengenai pengelolaan Wisata oleh BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa yang kemudian dalam analisis *masalah mursalah*, yang didalamnya ditemukan bagaimana cara-cara masyarakat dalam mengelola wisata baik secara umum maupun secara islami yang dapat menghasilkan kebermanfaatan terhadap masyarakat banyak.

**Bab V Penutup.** Bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran dari peneliti untuk pihak desa maupun untuk peneliti selanjutnya sebagai harapan dapat menjadi kemanfaatan bagi banyak orang dan dijadikan bahan kajian untuk peneliti selanjutnya.

















2. Partisipasi dari *stakeholder*. CBT didiskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Pembagian keuntungan yang adil. Tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha.
4. Penggunaan sumber daya lokal secara berkesinambungan. Salah satu kekuatan ekowisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat. Dimana semua aset dikelola oleh seluruh anggota masyarakat.
5. Penguatan institusi lokal. Penting melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat, hal tersebut bertujuan untuk mengatur hubungan anatar penduduk, sumber daya dan pengunjung.
6. Keterkaitan antara level regional dan nasional. Komunitas lokal seringkali kurang mendapat link langsung dengan pasar nasional, hal ini menjadi penyebab manfaat ekowisata tidak sampai dinikmati di level masyarakat. perenatara yaitu yang menghubungkan antara aktifitas pariwisata dengan masyarakat dan pengunjung justru memetik keuntungan lebih banyak.

Dalam pengaturan pembangunan pariwisata juga diperlukan adanya strategi yang harus ditekankan, strategi tersebut haruslah terfokus pada







telah mengerti pentingnya nilai-nilai aset yang dimiliki desanya, seperti alam, budaya, kuliner, bahkan gaya hidup sekalipun untuk dimanfaatkan dan dijadikan inovasi baru demi mewujudkan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan yang telah diinginkan bersama.

Diantara banyaknya desa yang telah menerapkan konsep CBT, Desa Gosari menjadi salah satunya. Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibantu oleh Pokdarwis, keikutsertaan masyarakat sangat terlihat dengan mereka yang bergabung dalam keanggotaan badan tersebut. Dari tujuan Desa Gosari membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebagai alat penguat ekonomi desa dan dapat membangun kebersamaan/menjalin kerekatan antar masyarakat. Untuk memperkuat tujuan tersebut badan usaha ini membuat atau memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa. Sebagai contoh adanya Wisata Alam Gosari (WAGOS), dalam pembentukan wisata tersebut posisi masyarakat desa adalah sebagai pencetus, pelaku pemelihara dan dapat menjadi dampak manfaat bagi dirinya.

Dalam konsep ini masyarakat (baik aparat desa atau masyarakat secara umum) mempunyai hak penuh terhadap keputusan-keputusan dalam proses pengelolaan baik penentuan ide, kreativitas maupun inovasi yang akan diambil. Pengelolaan administrasi wisata juga melibatkan masyarakat yang diwakili oleh Pokdarwis. Pokdarwis inilah yang menjalankan kegiatan





aset wilayah masih melimpah dan mempunyai potensi yang sangat besar, badan usaha di lingkup desa ini biasanya disebut dengan Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan istilah BUMDes.

Menurut pasal 1 ayat 6 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya sebagai kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>48</sup>

Lembaga ini didirikan sebagai salah satu usaha Desa yang dikelola oleh Desa bersama dengan pemerintahan Desa untuk memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. BUMDes menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berdasarkan pernyataan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi tersebut akan mendorong setiap pemerintahan Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes.<sup>49</sup>

BUMDes merupakan lembaga usaha yang bergerak dibidang pengelolaan aset-aset dan sumber daya ekonomi Desa dalam kerangka

---

<sup>48</sup>Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015),11.

<sup>49</sup>Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. (Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RRDN, 2007), 4.







Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Dan yang dimaksud kebutuhan dan potensi Desa adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
- b. Tersedia sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan Desa dan terdapat permintaan di pasar.
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

### **1. Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya

masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas dasar inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus selalu mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Namun tidak menutup kemungkinan modalnya akan didapat dari luar, seperti dari Pemerintahan Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat melakukan pinjaman dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa. Hal terpenting lainnya adalah bahwa BUMDes harus mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk membiasakan menabung, dengan demikian akan membantu peningkatan ekonomi masyarakat Desa secara mandiri.

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat Desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan lebih luas (Kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi Desa yang mendukung,











*Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak dibicarakan oleh *syara'* dan tidak terdapat dalil-dalil yang memerintahkan untuk mengerjakan ataupun meninggalkannya. Jika hal tersebut dikerjakan/dilakukan akan mendatangkan *Maslahah* atau kebaikan yang sangat besar. *Maslahah Mursalah* ini disebut sebagai kebaikan yang bersifat mutlak. Hal ini dikarenakan tidak adanya dalil yang mengakui kekeliruannya. Pembentukan *Maslahah Mursalah* ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan mendatangkan manfaat serta menolak kemudhorotan dan kerusakan bagi manusia.<sup>59</sup> Seperti program wisata oleh pemerintah desa yang tidak adanya *syara'* yang membahas, namun dengan adanya program desa tersebut dapat mendatangkan banyak kemanfaatan baik untuk pemerintahan desa maupun masyarakatnya demi mewujudkan kemaslahatan bersama.

*Maslahat* dalam syariat Islam memiliki *dhawabith* atau ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk menentukan substansi *maslahat* yang bersifat umum dengan mengaitkannya dengan dalil hukum sehingga timbul keterkaitan dan agar *maslahat* itu mempunyai kekuatan hukum.<sup>60</sup> Agar lebih jelas, maka *dhawabith Maslahah* dipaparkan dalam skema berikut ini:

---

<sup>59</sup>Achmad Yasin, *Ilmu Usul Fiqh (Dasar-Dasar Teori Istinbat Hukum Islam)*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 102.

<sup>60</sup>Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah (kaidah-kaidah ijthad dan fatwa dalam ekonomi Islam)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 107.















penting untuk membuat sebuah gagasan agar kesejahteraan tersebut bisa tercapai dengan meningkatkan faktor ekonomi didalamnya, di-era sekarang ini kegiatan tersebut banyak dilakukan oleh pemerintahan desa dalam pemanfaatan potensi desa-nya. Pemanfaatan tersebut biasanya di gagas untuk meningkatkan pendapatan desanya. Dengan bantuan pemerintahan daerah yang berupa edukasi mengenai pemanfaatan potensi yang selama ini telah tertinggal, banyak desa yang akhirnya memiliki *ghiroh* yang sangat besar untuk mempunyai badan usaha tersendiri dalam mengelola kekayaan alamnya.

Misalnya, Desa Gosari Kecamatan Ujung Pangkah yang memanfaatkan potensi alam dan peninggalan nenek moyangnya sebagai bahan utama dalam pembangunan desa wisata. Pembangunan desa wisata ini dilakukan oleh unit pemerintahan Desa Gosari yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dimana penjalanan teknisnya dilakukan oleh Pokdarwis sebagai spesialisasinya dibidang pariwisata. Semua program pemanfaatan alam tersebut oleh BUMDes Desa Gosari adalah langkah pemerintah desa dalam bidang perekonomian untuk menghasilkan profit yang jelas untuk kemaslahatan desa dan masyarakat secara umum.







tersebut wajib dilaporkan baik kepada aparat desa maupun masyarakat desa.

Akuntabilitas disini dimaksudkan sebagai bentuk tanggungjawab oleh sebuah lembaga yang segala sesuatunya berdasarkan kebenaran yang tidak ditutup-tutupi dan tidak juga dimanipulasi. Pernyataan ini bersambungan dengan akuntabilitas harus dilakukan dengan keterbukaan atau transparansi.

Akuntabilitas jika diambil dari sudut pandang syariah pertama muncul dari konsep kholifah yang artinya manusia sebagai pemimpin di muka bumi yang dalam menjalankan kehidupannya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum utama. ini berarti pemimpin bertanggungjawab atas segala sesuatu yang diperbuatnya dengan prinsip transparansi atau kejujuran sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.









pasar. Dalam proses pengembangannya belum tercover karena sebagai warisan program kerja pemerintahan terdahulu, sedangkan pemerintahan desa yang baru ingin lebih fokus kepada unit pariwisata.

- c. Unit Pelayanan Publik, unit ini bisa di contohkan sebagai sampah keliling yang melayani masyarakat agar lingkungan tetap bersih, dan juga pembayaran listrik agar masyarakat lebih mudah dan efisien dalam pembayaran.
- d. Unit Jual Beli Alat-Alat Sekolah, dengan membuka toko yang menjual alat-alat tulis dan foto copy untuk umum dapat menambah pemasukan BUMDes desa Gosari.
- e. Unit Pariwisata, pada unit ini BUMDes memanfaatkan potensi pada desa untuk kegiatan wisata yang akan menghasilkan profit untuk kesejahteraan desa, dalam hal ini Desa Gosari mendirikan Wisata Alam Gosari (WAGOS) untuk mewujudkan harapan untuk kesejahteraan desa.

Kelima unit BUMDes diatas memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendatangkan profit untuk desa. Namun dari kelima unit BUMDes tersebut ada empat unit yang profitnya masih berasal dari wilayah desa setempat, sedangkan Desa Gosari mengharapkan adanya *income* yang berasal dari masyarakat luar desa. Contohnya pada unit pariwisata, *income* yang dihasilkan dari Wisata Alam Gosari (WAGOS) bukan hanya sekedar dari masyarakat dalam desa saja namun pengunjung wisata banyak yang





























pengelolaan terhadap aset yang dimiliki Gosari menjadi sebuah obyek pariwisata bukan dengan cara yang instan. Pokdarwis merupakan perkumpulan masyarakat yang memang sadar akan pentingnya pembuatan wisata untuk desanya baik dari aspek ekonomi ataupun aspek eksistensi desa yang melakukan pengelolaan dari lahan mentah yang dinilai memiliki nilai potensial menjadi sebuah objek pariwisata yang diharapkan.

Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara langsung yang sebagian besar adalah bagian dari Pokdarwis. Pengelolaan yang pertama kali dilakukan adalah merawat sumber air warisan nenek moyang di Desa Gosari agar terawat dan dapat dijadikan sebagai aset sejarah. Dengan berawalnya pengelolaan terhadap sumber air tersebut maka pemuda desa berinisiatif melakukan pengelolaan pada potensi lainnya yaitu berkaitan dengan kekayaan alam Gosari. Dengan dikelolanya tanah desa untuk dijadikan area wisata dan memanfaatkan kreativitas atau inovasi yang dimiliki oleh masyarakat Gosari, maka langkah awal adalah munculah ide untuk membuat spot-spot foto dari bahan-bahan yang tanpa membeli seperti kayu. Pengelolaan yang memfokuskan pada penambahan pembuatan spot-spot setiap minggunya adalah tantangan bagi pemuda desa yang saat itu tidak di bayar sepeser-pun.

Dengan peningkatan pengelolaan yang terus bertambah baik, maka pengurus Pokdarwis sepakat untuk memberikan kotak amal







yang bergerak di bidang pariwisata. BUMDes harus memastikan jika pengelolaan yang dilakukan Pokdarwis baik dalam hal pembangunan atau administrasi keuangan wisata apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan berjalan dengan baik.

- 3) *Menerima laporan dan membuat rekap laporan dari Pokdarwis*, BUMDes sebagai salah satu program layanan desa yang dalam unit nya terdapat produk yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Badan Usaha ini mempunyai hak untuk menerima laporan dari Pokdarwis terkait pengelolaan yang dilakukan terhadap Wisata Alam Gosari atau WAGOS, laporan tersebut harus di terima oleh BUMDes sebelum akhirnya akan diterima oleh aparat desa (dalam hal ini adalah Kepala Desa dan staf-staf nya). BUMDes melakukan *crosscheck* pada dokumen-dokumen administrasi yang sudah dibuat oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang selanjutnya akan di berikan kepada aparat desa sebagai laporan BUMDes yang membawahi pengelolaan Pariwisata.
- 4) *Pengelolaan anggaran dana untuk Pariwisata*, bukan hanya memonitoring ataupun membuat laporan, namun BUMDes harus menyiapkan anggaran yang diperolehnya dari dana desa untuk kepentingan unit-unitnya. Anggaran desa ini selanjutnya oleh BUMDes dialokasikan untuk Wisata Alam Gosari (WAGOS) untuk keperluan pengelolaan Wisata agar terus berkembang. Seperti





yang bekerja sebagai petani ikut membantu dalam pengawasan jika ada kegiatan remaja yang mengarah ke hal yang negatif.

3. Menerapkan kesadaran individu akan perbuatan negatif. Dengan mengusahakan pembangunan area wisata yang berdekatan satu sama lain, pemerintah meyakini jika banyak pengunjung yang tersebar ke seluruh area wisata, hal tersebut dapat mempengaruhi kesadaran para remaja untuk tidak berbuat hal yang negative karena kondisi wisata yang ramai pengunjung.

Pemerintahan desa meyakini bahwa setiap perbuatan yang baik atau niat yang baik pasti ada hal yang buruk, tinggal seberapa besar kebaikan dan keburukannya. Sebagai contoh adalah pro dan kontra yang terjadi di masyarakat terkait adanya WAGOS, dengan membuktikan terhadap masyarakat bahwa dengan adanya wisata banyak kemanfaatan yang diperoleh yaitu ekonomi desa dan eksistensi desa bisa terbantu. Begitupula dengan anggapan negatif masyarakat, seiring berjalannya waktu anggapan negatif tersebut semakin pudar dan berganti dengan kepercayaan secara utuh oleh masyarakat bahwa dengan adanya pariwisata masyarakat sangat diuntungkan. Dan pemerintah berharap agar masyarakat desa secara menyeluruh dapat berpartisipasi langsung dalam pengelolaan pariwisata, begitu juga dengan para pemuda desa harus tetap bersama-



















#### **A. Pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) Oleh Masyarakat.**

Pengelolaan wisata ini dilakukan oleh masyarakat secara langsung yang sebagian besar adalah bagian dari Pokdarwis, dimana Pokdarwis adalah salah satu bagian dari BUMDes. Pengelolaan wisata ini dilakukan bersama masyarakat dengan tujuan untuk menggali bakat dan kreativitas masyarakat, begitupun dengan kondisi ekonomi masyarakat yang akan terbantu jika masyarakat ikut serta dalam pengelolaan wisata. Masyarakat adalah bagian terpenting dari sebuah desa, saat masyarakat bergotong-royang ikut serta dalam peningkatan pengelolaan potensi yang dimiliki desa, banyak keuntungan yang akan diperoleh, seperti peningkatan perekonomian desa. Seperti tujuan dari adanya Badan Usaha Milik desa (BUMDes) yang sifatnya adalah menjadi sentral pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Dari pengelolaan wisata yang dilakukan oleh masyarakat, BUMDes secara structural juga melakukan pengelolaan baik secara teknis maupun administratif terhadap kegiatan wisata, namun peran pemerintahan Desa Gosari juga sangat diperlukan. Dalam pengelolaan Pariwisata, pemerintahan desa mempunyai posisi yang sangat penting yakni memberikan support, fasilitas dalam bentuk alokasi dana dan pengawasan, sehingga pemerintahan desa wajib menerima setiap laporan yang harus diberikan oleh BUMDes yang sebelumnya berasal dari Pokdarwis. Namun sebelumnya, juga telah di *crosscheck* oleh BUMDes yang selanjutnya akan dijadikan laporan, arsip dan panduan untuk proses pengelolaan pariwisata dan pengembangan selanjutnya.

Pengelolaan pariwisata di Gosari sebagian besar dilakukan oleh masyarakat desa itu sendiri sedangkan keikutsertaan masyarakat terhadap pengelolaan inilah menjadikan WAGOS sebagai wisata berbasis masyarakat, semua hal pengelolaan dan manfaat yang diperoleh dari hasil kelola akan dinikmati masyarakat banyak. Tentang keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan, dipaparkan oleh informan 1, bahwa:

“Awalnya dari pemuda desa yang mau merawat wilayah sekitar situ, disitu kan ada pancuran sumber air, mereka rawat. Ketika sebagian ada yang merawat dan ada yang *iseng-iseng* membuat spot. Pertama adalah rumah segitiga, akhirnya di upload di facebook, akhirnya banyak yang datang dan responnya buruk karena setelah foto gak tau mau ngapain. Setelah itu para pemuda kumpul lagi dan lebih fokus dan bikin sruktur, semua pemuda dimasukkan. Setelah itu disepakati target setiap minggu ada spot baru.”

Begitu juga dengan pemaparan yang diungkapkan oleh informan 2 dan informan 3 yang tidak jauh beda dari informan 1, yaitu:

*Informan 2:*

”Adanya wisata ini pertama itu sebagai objek kawan-kawan pemuda ini sebagai pengelola wisata ini yang dipercayai BUMDes dan pemerintah desa. Ini adalah wadah kreativitas mereka dalam berkarya, belajar mengelola wisata.”

*Informan 3:*

“Wisata ini dibebaskan untuk masyarakat terutama para pemuda, kami membiarkan para pemuda berkreaitivitas dan kami memfasilitasi dananya untuk apa untuk apa tinggal mengeluarkan. Kita hanya memantau.”

Seperti halnya dari hasil wawancara dengan informan 4 yang menyatakan bahwa masyarakat ikutserta dalam pengelolaannya, bahwa:

“Anak saya itu mbak juga ikut mengelola, bikin rumah-rumahan, banyak pemuda juga yang ikut jaga parkir, mengelola kafe sawah, ikut mengelola autobond mb, saya senang.”



Dari hasil pernyataan diatas, peneliti mendapatkan kesimpulan dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan di Desa Gosari. Bahwa Wisata Alam Gosari (WAGOS) merupakan wisata yang didirikan dari hasil pemikiran dan ide dari masyarakat Gosari sendiri, dengan melibatkan aparat desa dalam hal melegalkan dan lebih terstruktur. Wisata ini juga bisa disebut dengan wisata berbasis masyarakat karena baik dalam penemuan ide dalam pemanfaatan potensi, keputusan dalam mengambil kebijakan, pengelolaan wisata maupun kemanfaatan yang diambil dari hasil pengelolaan ada pada masyarakat. Semua hal yang dilakukan masyarakat dan pemerintahan desa semata mata dengan tujuan mewujudkan apa yang telah dicita-citakan oleh Desa Gosari untuk menjadi desa pariwisata.

Dalam Pengelolaan Wisata Alam Gosari oleh BUMDes yang secara teknis dilakukan oleh masyarakat Gosari ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) baik secara konvensional maupun secara Islami, peneliti mengambil kesimpulan ini berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa:

#### 1. Kerjasama

Kerjasama bisa diartikan sebagai *Kooperatif* secara umum dan diartikan sebagai *syirkah* dalam Islam. Dalam Pengelolaan WAGOS, masyarakat Desa Gosari telah melakukan poin diatas, mereka telah melakukan kerjasama dengan baik dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Gosari dapat mendirikan dan





sebagai bentuk pelestarian potensi (warisan budaya) Desa Gosari yang harus dimanfaatkan demi mendapatkan manfaat yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat. pengelolaan oleh masyarakat ini juga tidak terlepas dari pantauan BUMDes.

#### 6. Emansipatif

Emansipatif berarti sikap keberpihakan suatu golongan terhadap golongan lain yang dianggap lemah, dalam hal ini adalah mengenai lemahnya perekonomian sebagian masyarakat Gosari. Adanya Wisata Alam Gosari (WAGOS) prinsip emansipatif telah diterapkan. Misalnya pemerintah desa memberikan peluang masyarakat untuk berkerja di wisata adalah bukti keberpihakan terhadap masyarakat yang lemah secara financial karena belum memiliki. Contoh yang lain adalah alokasi dana sosial diberikan kepada masyarakat yang dalam kesusahan.

#### **B. Pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) Dalam Analisis *Maslahah Mursalah*.**

Mewujudkan wisata yang maju bukan perkara gampang untuk pariwisata yang masih baru, persaingan yang cukup ketat di sekitar desa pesaing menjadi ancaman bagi WAGOS, namun pihak pengurus bersepakat bahwa dengan banyaknya pariwisata didesa tetangga tidak menjadikan WAGOS risau, semua hal tersebut dijadikan trik promosi oleh pengurus untuk saling mempromosikan adanya beberapa desa wisata dilingkup kecamatan Ujungpangkah yang harus dikunjungi. Adanya desa wisata di

Desa Gosari ini banyak menimbulkan dampak positif bagi desa, dampak positif tersebut termasuk sebagai kemaslahatan yang didapat dari pendirian wisata, dan berbagai dampak tersebut dibarengi dengan wujud dari penerapan *Community Based Tourism* (CBT) atau bisa disebut dengan wisata berbasis masyarakat, hal-hal tersebut dapat peneliti rincikan sebagai berikut:

### 1. Mengubah Kebudayaan Yang Negatif

Budaya Desa Gosari sebelum adanya wisata tidak bisa dikatakan baik. Banyaknya pemuda yang *tawuran* dan *keluyuran* saat malam maupun siang saat hari-hari besar membuat masyarakat risau. Karena banyak pemuda yang belum menemukan fokus hidup dan pekerjaan yang positif, maka aspek negatif lingkungan mempengaruhi. Peran Wisata adalah mengubah para pemuda yang semula melakukan aktivitas yang negatif dan dapat mempengaruhi pemuda untuk melakukan kegiatan positif dengan lebih terfokus terhadap pengelolaan Wisata agar semakin berkembang. Keikutsertaan pemuda dan antusias pemuda sebagian besar membuat aparat pemerintah *menggandeng* pemuda agar terus membantu dalam pengelolaan wisata. Sebagai contoh yaitu dengan mengadakan acara mengenai Wisata di hari-hati besar, dengan begitu para pemuda tidak lagi mempunyai peluang untuk bertindak yang dapat merugikan masyarakat banyak.

Solusi dari kondisi diatas menunjukkan adanya masalah yang ditimbulkann adanya wisata dengan *dibarenginya* ketertarikan atau partisipasi pemuda lokal dan tindakan pendekatan dari aparat desa ini

bukan hanya dapat membuat budaya yang negatif pada Desa Gosari semakin terkikis, namun juga dapat membantu mempermudah pengelolaan Wisata Alam, kegiatan keikutsertaan pengelolaan inilah sebagai wujud dari salah satu maksud wisata berbasis masyarakat.

## *2. Membuka Lapangan Pekerjaan Baru*

Diketahui bahwa angka pengangguran di Desa Gosari masih terbilang tinggi yakni sekitar 14.61%. Angka terbilang cukup membuat pemerintah desa bekerja ekstra untuk mengikis angka tersebut. Sejak tahun 70-an penduduk Gosari sebagian besar bekerja sebagai penambang, namun pertambangan lambat laun pasti ada masanya berhenti, dengan adanya Wisata Alam Gosari (WAGOS) maka secara tidak langsung banyak lapangan pekerjaan baru yang disediakan oleh pemerintahan desa untuk masyarakatnya yang belum bekerja. Pekerjaan yang disediakan adalah sekitar lokasi Pariwisata, diantaranya adalah: Penjaga karcis, penjual, pemandu Autbond, penjaga kafe dan lain sebagainya.

Seiring berjalannya waktu, WAGOS sudah memperkerjakan 4 pekerja tetap rutin setiap hari, dan 20 orang jika hari libur, kemudian ada 10 lapak yang awalnya cuma 3 yang dikelola oleh masyarakat dengan jangka waktu 3 tahun terakhir. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang telah diisi oleh sebagian masyarakat Gosari, secara otomatis dapat membantu masyarakat Gosari secara ekonomi dengan adanya wisata dan berharap dapat mengcover kebutuhan masyarakat hingga beberapa tahun kedepan.







BUMDes. Kegiatan tersebut menandakan bahwa masyarakat yang belum terlibat langsung dalam pengelolaan bisa memperoleh keuntungan dari hasil wisata, hal tersebut menjadi salah satu wujud dari wisata berbasis masyarakat yang digunakan dalam kerangka konsep penelitian ini.

Dalam keputusan pendirian Wisata di Desa Gosari, Seringkali segala sesuatu keputusan diambil untuk kebaikan individu, namun keputusan tersebut bukanlah perkara yang benar, keputusan yang diambil dengan tujuan mewujudkan kebermanfaatkan umat adalah hal yang paling mulia. Seperti pendirian potensi alam di Desa Gosari Kecamatan Ujungpangkah, dengan maksud penjagaan dan pelestarian aset budaya. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan keputusan pendirian tersebut yang akhirnya dijadikan lahan pariwisata. keuntungan atau kemanfaatan yang diperuntuhkan untuk orang banyak tanpa menimbulkan kemudhorotan untuk kaum yang lainnya disebut dengan *Maslahah Mursalah*.

Namun, ada beberapa syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi untuk bisa mengatakan bahwa pengelolaan Wisata Alam Gosari (WAGOS) bisa dianggap sebagai bentuk dari *Maslahah Mursalah*, Dari keempat dampak positif yang telah diperoleh oleh Desa Gosari dengan adanya Wisata Alam Gosari (WAGOS) tersebut dapat kita kolerasikan dengan perspektif *fiqh*, dalam hal ini aspek yang telah di dapatkan baik dari pemerintahan desa maupun dari masyarakat desa dapat dikolerasikan dengan *Maslahah Mursalah*. Ada beberapa syarat sesuatu tersebut dianggap sebagai *Maslahah Mursalah*, diantaranya adalah:

1. Dapat disebut sebagai *maslahat* jika sesuatu tersebut bersifat umum dan dapat diterima oleh akal sehat bahwa benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudhorotan.

Ketika kondisi Desa Gosari dengan presentase penduduk yang belum bekerja relatif tinggi dan warisan budaya yang semulanya tidak terurus, maka menjadi kebutuhan pokok bagi Desa Gosari untuk mengupayakan adanya solusi terkait hal tersebut. Dengan adanya Wisata Alam Gosari (WAGOS) permasalahan desa sebelumnya akan sedikit demi sedikit mulai teratasi. Pendirian tersebut juga bentuk dari sikap menjauhi kemudhorotan.

Wisata Alam Gosari (WAGOS) merupakan sebuah gagasan yang telah dituangkan menjadi sebuah produk pariwisata yang dapat dinikmati secara umum baik dari masyarakat desa nya maupun luar desa. Wisata ini juga banyak mendatangkan kemanfaatan baik untuk pendapatan dan eksistensi desa maupun ekonomi masyarakat khususnya. Begitupula dengan menolak kemudhorotan, adanya wisata ini dapat mencegah angka pengangguran di Desa Gosari meningkat begitupun dengan perilaku buruk sebagian masyarakat digantikan dengan tindakan yang positif dengan keikutsertaanya dalam mengelola Pariwisata.

2. Sejalan dengan tujuan *syara'*, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi semua umat manusia.

*Maslahah Mursalah* adalah manfaat yang bersifat umum tanpa merugikan pihak lain. Tujuan Gosari mendirikan sebuah obyek pariwisata











penggunaan lokasi pertambangan sebagai area wisata ini jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan mafsadatnya. Oleh karena itu wisata alam ini didirikan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar.

Dari konsep masalah diatas, ada 4 (empat) syarat yang harus direalisasikan agar hal tersebut bisa dikatakan masalah. Dari keempat syarat tersebut telah menunjukkan bahwa keputusan pendirian wisata ini lebih banyak mendatangkan kemanfaatan daripada keburukannya. Jadi, untuk mengatasi kerusakan yang timbul dari penambangan, maka pemerintahan desa telah membentuk unit tersendiri yang dinaungi oleh BUMDes untuk mengatur dan mengontrol penggunaan wilayah tambang agar kegiatan yang dilakukan tidak merugikan dan merusak lingkungan. Karena jika kegiatan penambangan tidak diserahkan kepada aparat pemerintahan, kemungkinan besar akan terjadi penambangann besar-besaran oleh masyarakat tanpa memperhitungkan aspek mafsadatnya.





2. Banyak kemanfaatan yang dapat dirasakan bagi masyarakat Gosari setelah adanya WAGOS, diantaranya adalah: *pertama*, mengubah kebudayaan masyarakat yang negatif (*tawuran, keluyuran*) sebelum adanya wisata dan mengubahnya dengan kegiatan positif dengan melibatkan pemuda dalam semua kegiatan di wisata. *Kedua*, membuka lapangan pekerjaan baru di Desa Gosari baik pekerjaan untuk tenaga di wisata maupun pekerjaan sebagai pedagang di wisata. *Ketiga*, meningkatkan eksistensi desa agar lebih diperhitungkan pada masyarakat luar. Dan yang *keempat* adalah dapat meningkatkan pendapatan desa secara signifikan, meskipun belum bisa dialokasikan untuk kebutuhan desa yang lain. Alokasi dana hasil dari wisata masih dalam 2 (dua) arah, yakni untuk proses pengelolaan WAGOS agar terus berkembang pesat dan untuk dana sosial bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Kemanfaatan yang diperoleh oleh Desa Gosari dengan tujuan meninggalkan kemudhorotan adalah *Maslahah Mursalah*, hal tersebut telah diketahui dengan korelasi yang ada antara dampak positif yang timbul adanya Wisata dengan syarat *Maslahah Mursalah*, diantaranya adalah: *Pertama*, didirikannya WAGOS adalah sebagai bentuk penjagaan terhadap kondisi desa dan menghindari kemudhorotan. *Kedua*, WAGOS dapat dikatakan sebagai maslahat karena membawa kemanfaatan secara umum untuk seluruh masyarakat baik dalam bidang ekonomi ataupun budaya. *Ketiga*, didirikannya WAGOS tidak berbenturan dengan dalil

syara' karena sebelumnya telah mengalami pertimbangan-pertimbangan oleh masyarakat dan aparat pemerintah. *Keempat*, WAGOS dilakukan atau didirikan karena potensi desa yang perlu dirawat sebagai upaya pemecahan masalah atas kondisi desa, sehingga dapat menghindarkan umat dari kesulitan.

3. Wisata Alam Gosari (WAGOS) dikatakan masalah karena telah memenuhi kelima hajat, yakni: *hifdzu din, hifdzu nafs, hifdzu aql, hifdzu nasab* dan *hifdzu maal*. Kelima hajat tersebut telah dipenuhi dan yang paling utama adalah dalam pemeliharaan akal dan jiwa. Kedua hajat tersebut berkaitan dengan wadah kreatifitas dan keikutsertaan pemuda, berikut dengan pemeliharaan jiwa yang berkaitan dengan penjaminan hak hidup manusia lain, seperti tersedianya lapangan kerja baru untuk masyarakat lokal, namun dampak ini dirasa kurang karena lapangan pekerjaan yang masih minim dan alokasi dana sosial juga belum maksimal. Sedangkan untuk penjagaan agama dirasa masih kurang karena tempat ibadah yang masih sederhana. Menjaga keturunan juga masih belum menunjukkan manfaat yang lainnya selain warisan sumber air. Untuk penjagaan harta (kekayaan alam), di sini disebutkan sebagai penjagaan terhadap potensi alam yang dirasa masih kurang nampak sisi maslahatnya jika tidak dijadikan bahan konsen kedepannya.



















